

# PROSPEK ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IDB) SEBAGAI REPRESENTASI KEBANGKITAN SISTEM EKONOMI ISLAM DI TENGAH KONSTELASI EKONOMI INTERNASIONAL

Oleh: Ulfa Jamilatul Farida<sup>1</sup>

## Abstract

*This article aims to oversee the prospect of Islamic Development Bank (IDB) to accelerate the rise of Islamic economic system around the globe. The potential rule of IDB is examined through several international relations theory in library research. The result concludes that IDB has potentially high capacity to be representative of the rise Islamic economic system in the international competition environment. The prosperity and wealth of Muslim nations could be gained only if the network and cooperation among them can be implemented so that integration and political community can be developed as decision maker for Muslim affairs. Through IDB as manifestation of an international Muslim country, an Islamic system can be realized, especially in the economy, but it requires network and loyalty of Muslim countries.*

*Kata kunci:* Islamic Development Bank, globalisasi, ekonomi internasional

## I. Latar Belakang

Di era *Millenium* Ketiga ini kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara-bangsa. Tidak jarang keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Oleh karena itu, ilmu ekonomi menjadi amat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Demikian juga peradaban Islam yang gemilang di masa silam tidak mungkin terwujud tanpa dukungan kekuatan ekonomi dan ilmu ekonominya. Kehidupan perekonomian peradaban Islam pada masa keemasan tersebut sangat maju jika dibandingkan dengan peradaban lainnya, termasuk peradaban Eropa. Kejayaan ekonomi pada masa-masa kejayaan Islam di era Kekhilafahan tersebut tentu saja didukung oleh kondisi politik yang sangat kondusif bagi Islam untuk menjadi perdaban besar dan sangat berpengaruh.

Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang tumbuh dan menjadi gerakan perekonomian Islam sejak seperempat abad yang lalu. Namun demikian, pergeseran orientasi dari pemikiran ekonomi ke sebuah gerakan perekonomian tak terpisahkan dari

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.  
Email: ulfa\_faiz@yahoo.com

presiden runtuhnya institusi Khilafah tahun 1924<sup>2</sup> dan setelah itu tentu ada upaya untuk menghidupkannya kembali hingga terbentuknya Organisasi Konferensi Islam. Dengan kata lain, salah satu produk penting yang menyertai kelahiran OKI adalah terpicunya pemikiran ekonomi Islam menjadi gerakan perekonomian Islam. Gerakan itu ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Ekonomi Islam secara teratur. Pemantapan hati negara-negara anggota OKI untuk mengislamisasi ekonomi negaranya masing-masing tumbuh setelah Konferensi Ekonomi Islam III yang diselenggarakan di Islamabad Pakistan bulan Maret 1983.<sup>3</sup> Hasilnya, sejumlah pemerintahan Islam sudah mendirikan Departemen atau Fakultas Ekonomi Islam di universitas-universitas mereka, bahkan sudah mulai meng-Islamkan lembaga perbankan mereka. Gerakan ekonomi syariah adalah suatu upaya membentuk Sistem Ekonomi Islam (SEI) yang mencakup semua aspek ekonomi sebagaimana didefinisikan oleh Umer Chapra dalam *The Future of Economics*.<sup>4</sup>

Dari kenyataan terbentuknya OKI dengan segala harapan akan perubahan di dalam Dunia Islam nampak bahwa kehidupan perekonomian di beberapa negara Muslim masuk pada kategori negara sedang berkembang (*developing countries*) dan posisi ini tentu pada sistem ekonomi dunia bukanlah posisi strategis sebagai pemegang wewenang atau pengendali. Ketika kita membicarakan dinamika perjalanan sistem ekonomi Islam, harus kita sadari bahwa sistem ekonomi dunia pun berjalan dan bahkan jauh lebih cepat sehingga bagaimanapun perjuangan untuk sebuah kemajuan ekonomi dalam hal ini ekonomi Islam masih sangat panjang. Pasca runtuhnya sistem Kekhilafahan Islam dan gebrakan *Renaissance* di Eropa, kehidupan perekonomian dunia tentu sangat dipengaruhi oleh peradaban Barat yang selanjutnya maju lebih pesat. Segala perubahan yang terjadi di hampir semua aspek kehidupan di Dunia sudah dapat dipastikan ada pengaruh dari Barat mengingat peradaban itulah yang sekarang menjadi *hegemon*, termasuk dalam hal ini adalah fenomena globalisasi di segala bidang khususnya ekonomi.

Dalam konteks ekonomi lembaga dibawah OKI yang *concern* bidang ekonomi dan keuangan adalah IDB. IDB adalah suatu lembaga keuangan internasional yang dibentuk berdasarkan Deklarasi yang dihasilkan dari pada konferensi menteri-menteri keuangan Negara-negara Islam anggota OKI yang dilaksanakan di Jeddah pada Dhul Q'adah 1393H atau bertepatan dengan Desember 1973. Adapun pelantikan Dewan Gubernur mengambil dilaksanakan pada bulan rajab 1395H bertepatan dengan Juli 1975, dan IDB secara formal dibuka pada 15 syawal 1395H bertepatan dengan 20

---

<sup>2</sup> Pasca Perang Dunia II berakhir banyak pemuda mahasiswa Muslim belajar ekonomi di Barat sehingga mereka mendapat wawasan ekonomi yang luas. Menyadari hal itu mereka berupaya menghidupkan kembali prinsip, nilai, norma dan hukum ekonomi Islami untuk kemudian mereka berusaha untuk mengaplikasikannya di tanah air mereka.

<sup>3</sup> Javed Ansari, "Ekonomi Islam antar Neoklasik dan Strukturalis: Laporan dari Islamabad" dalam *Islamisasi Ekonomi: Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Amrullah, dkk.) (Yogyakarta: PLP2M, 1985), hal. 100-111

<sup>4</sup> *Ibid.*

Oktober 1975.<sup>5</sup> Tujuan utama IDB adalah untuk membantu perkembangan pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara Islam dan atau negara-negara anggota baik secara individu maupun kolektif yang secara bersama-sama berekonomi menurut syariah.

Globalisasi menjadi konsep yang cukup representatif menjelaskan beberapa fenomena kehidupan khususnya dalam hal ini kehidupan ekonomi dunia. Percepatan perputaran uang dan sistem produksi yang hanya menguntungkan pemilik modal menjadi kenyataan pahit bagi negara-negara miskin atau sedang berkembang yang tentu hanya akan menjadi obyek bahkan korban globalisasi. Globalisasi merupakan paradigma baru bagi setiap negara bangsa di dunia ini. Konsep globalisasi yang berkembang sejak 1985 ini menarik untuk di analisis walaupun konsep tersebut lebih sering digunakan hanya untuk kajian ekonomi politik. Untuk memahami konsep globalisasi lebih lanjut, perlu dilihat faktor dan latar belakang penyebab kelahirannya pada pertengahan 80-an. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya globalisasi, namun yang nampak nyata adalah tindakan Kongres Amerika Serikat di bawah pimpinan presiden Reagan yang menjalankan kebijakan Neo-liberalisme pada tahun 1984.<sup>6</sup> Kebijakan ini selanjutnya diikuti oleh negara-negara maju lainnya seperti Inggris, dan negara di Eropa lainnya.

Melihat gambaran singkat di atas, kita tentu akan mempertanyakan bagaimana Sistem ekonomi Islam melakukan *bargaining position* dengan negara-negara Barat sebagai pusat dan *icon* globalisasi yang mana tentu tidak bisa kita pungkiri besarnya pengaruh negara-negara tersebut terhadap perkembangan ekonomi Dunia Islam. Dari uraian di atas muncul satu pertanyaan besar yang selanjutnya menjadi permasalahan pada artikel ini, yaitu: “Bagaimana Prospek IDB (*Islamic Development Bank*) sebagai Representasi Kebangkitan Ekonomi Islam dalam Konstelasi Ekonomi Internasional?”

## II. Kerangka Berfikir

### A. Kerangka Fungsionalisme

Neo fungsionalisme adalah salah satu pemikiran dari teori integrasi yang paling menyeluruh, sekalipun banyak mendapat kritikan. Neo fungsionalisme pada dasarnya dapat dilihat sebagai kelanjutan dari tradisi berfikir kaum fungsionalisme. Fungsionalisme merupakan cabang dari strukturalisme. Pencetus fungsionalisme adalah Emile Durkheim, yang menyatakan bahwa fakta-fakta sosial membutuhkan penjelasan kemasyarakatan yang bersifat fungsional.<sup>7</sup> Di bawah ini akan

---

<sup>5</sup>[www.isdb.com](http://www.isdb.com)

<sup>6</sup>[http://www.acehinstitute.org/opini\\_effendi\\_hasan\\_280507\\_globalisasi\\_dan\\_pengaruhnya\\_thd\\_negara\\_miskin.htm](http://www.acehinstitute.org/opini_effendi_hasan_280507_globalisasi_dan_pengaruhnya_thd_negara_miskin.htm), diakses tanggal: 8 Agustus 2010

<sup>7</sup> David Apter, 1985, *Introduction to Political Analysis*, terj. Setiawan Abadi (Jakarta: LP3ES), hal. 371

dijelaskan beberapa pemikiran neo fungsionalisme sebagai pisau analisa dalam masalah ini.

## B. Teori Integrasi

Berbicara mengenai teori integrasi, dalam hal ini akan diambil beberapa pendapat tentang integrasi dari aliran fungsionalisme. Menurut Ernst B. Hass, integrasi adalah:

*“integration as a process “whereby political actors in several distinc national settings are persuaded to shift their loyalties, expectations, and political activities toward a new center, whose institutions process or demand jurisdiction over the preexisting national states.”<sup>8</sup>*

Tampak dalam definisi ini bahwa integrasi adalah suatu proses di mana aktor-aktor politik di beberapa wilayah nasional yang berbeda terdorong untuk memindahkan kesetiaan, harapan, dan kegiatan politik mereka ke suatu pusat baru yang lembaga-lembaganya memiliki atau menuntut yurisdiksi atas negara-negara nasional yang ada sebelumnya. Yang terpenting dari definisi ini adalah gagasan bahwa hasil akhir suatu proses integrasi berujung “komunitas politik”.

Kemudian definisi yang lain adalah dari Karl W. Deutsch yang menyatakan tentang integrasi politik. Menurut Deutsch integrasi politik:

*“political integration as a process that may lead to a condition in which a group of people has attained within a territory a sense of community and institutions and practices strong enough to assure, for a long time, dependable expectations of peaceful change among, its population”.<sup>9</sup>*

*“Deutsch suggests that integration is a matter of fact, not of time”.<sup>10</sup>*

Dari sini terlihat bahwa integrasi adalah sebuah proses yang dimungkinkan akan membentuk suatu kondisi kebersamaan yang akan menjamin kehidupan damai dan tidak saling berselisih dan akan menyelesaikan pertikaian atau masalah di antara mereka dengan cara-cara di luar peperangan. Integrasi merupakan fakta akan kebutuhan untuk bersatu guna mencapai tujuan bersama.

Dari kerangka ini kita akan menganalisa bagaimana Organisasi Konferensi Islam (OKI) menjalankan fungsinya sebagai media kebangkitan umat Islam dari keterpurukan yang panjang termasuk dalam hal ini adalah masalah ekonomi. Lebih dari itu makalah ini juga membahas mengenai prospek OKI ke depan khususnya tentang perannya sebagai media kebangkitan ekonomi Islam.

---

<sup>8</sup> James Daugherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., 1990, *Contending Theories of Internastional Relations A Comprehensive Survey Third Edition* (New York, Harper Collins Publisher), hal. 433

<sup>9</sup> Karl W. Deutsch et al, 1957, *Political Community and The North Atlantic Area* (Princeton, Pricenton University Press), hal.5

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 6

### C. Globalisasi

Globalisasi dapat diartikan sebagai perluasan, pendalaman, serta pergerakan yang cepat dalam keterhubungan secara luas dan mendunia atas semua aspek kehidupan sosial dalam dunia kontemporer.<sup>11</sup> Globalisasi dapat pula dipandang sebagai intensifikasi dari bidang-bidang ekonomi, politik, dan hubungan antar budaya yang melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara. Globalisasi adalah suatu fenomena yang tidak dapat dipisahkan begitu saja dari bidang ekonomi maupun sistem ekonomi global, karena pada dasarnya globalisasi adalah dampak dari pengejawantahan liberalisasi ekonomi, yang dimulai oleh negara-negara Barat, yang menginginkan agar negara maupun individu meningkatkan kekuatan pasar. Globalisasi ini didukung oleh semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin luasnya penyebaran informasi yang menjadikan seolah-olah negara-negara di dunia tidak lagi memiliki batas-batas wilayah antar negara.

### III. Eksistensi Islamic Development Bank (IDB)

Berbicara mengenai lahirnya IDB maka tidak dapat dilepaskan dari organisasi induknya yaitu Organisasi Konferensi Islam. Kemunculan OKI memang dilatarbelakangi oleh konflik Timur Tengah yaitu masalah Israel Palestina namun belakangan keberadaan OKI tidak lagi sekedar dikaitkan dengan upaya pembebasan rakyat Palestina dari cengkeraman Israel. Lebih dari itu, kiprah OKI dengan segenap kelembagaan dan potensi yang dimilikinya termasuk IDB telah dapat memainkan peran yang lebih luas, yakni mencakup berbagai persoalan yang dihadapi dunia Islam dibidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Dalam konteks ekonomi, IDB merupakan representasi aktifitas ekonomi negara-negara muslim yang notabene anggota OKI.

Islamic Development Bank (IDB) atau Bank Pembangunan Islami, merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1975 (1392 H) oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim dinegara bukan anggota berlandaskan prinsip-prinsip Islami/ Syariah.

Visi IDB adalah menjadi leader dalam membantu perkembangan pembangunan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim yang tinggal bukan dinegara anggota sesuai dengan prinsip Islami/ Syari'ah. Adapun misinya adalah mendukung pembangunan manusia secara komprehensif dengan fokus pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, serta peningkatan pengelolaan dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi utama IDB adalah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Islami untuk pembangunan ekonomi dan sosial, terutama untuk proyek-proyek

---

<sup>11</sup> David Held & Anthony Mc. Grew, David Goldblatt & Jonathan Peraton, 1999, *Global Transformations: Politics, Economics, and Culture* (Great Britain: Polity Press), hal. 2

yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Prinsip operasional IDB antara lain :

1. IDB menjadi khalifah (pelopor) pembangunan berdasarkan landasan islam
2. IDB proaktif
3. IDB selalu menjaga hubungan dan berusaha meningkatkan kerjasama
4. IDB menjadikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai target sebelum menyusunnya menjadi program.
5. IDB berkonsultasi dengan intens kepada setiap stakeholders dalam setiap program yang diajukan

#### IV. Sistem Ekonomi Islam

Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi, dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman semacam itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan ekonomi.<sup>12</sup>

Selanjutnya, kita akan membahas apa yang disebut sistem ekonomi Islam, secara sederhana kita bisa mengatakan, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yaitu: Al Qur'an, As sunah, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

Mengiringi kondisi obyektif di atas perkembangan pemikiran di bidang ilmu ekonomi syariah menjadi gerakan pembangunan SEI semakin terpacu dan tumbuh disertai faktor-faktor lain yang mendahuluinya, yaitu: *pertama*, telah terumuskannya konsep teoritis tentang Bank Islam pada tahun 1940-an; *kedua*, lahirnya ide dan gagasan mendirikan Bank Islam dalam Keputusan Konferensi Negara-negara Islam se-Dunia bulan April 1968 di Kuala Lumpur; *ketiga*, lahirnya negara-negara Islam yang melimpah petro dolarinya. Maka, pendirian bank Islam menjadi kenyataan dan dapat dilaksanakan tahun 1975.<sup>13</sup>

Sebelum membahas lebih jauh mengenai permasalahan ini, maka akan lebih baik jika kita mengetahui salah satu definisi ekonomi Islam sebagai suatu konsep dari ahli ekonomi Islam. Menurut M. Umer Chapra ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan

---

<sup>12</sup> Mustafa Edwin Nasution, 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana), hal. 11

<sup>13</sup> Sutan Remy Syahdeini, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Grafiti, Jakarta) hal. 4-5 dengan mengutip berbagai sumber.

lingkungan.<sup>14</sup> Definisi dari Umer Chapra ini cukup representatif untuk menjawab mengenai konsep ekonomi Islam yang selanjutnya akan dianalisis dalam makalah ini.

## V. Ekonomi Internasional sebagai sebuah Sistem

Globalisasi ekonomi menurut Ankie Hoogvelt<sup>15</sup> mengandung tiga prinsip dasar. Pertama fenomena dunia yang sekarang ini menjadi milik bersama hampir setiap orang di muka bumi melahirkan sebuah disiplin pasar global dari sekedar sebuah wilayah pasar global. Kedua, globalisasi menata kembali cara aktivitas ekonomi dikonseptualisasikan dan diorganisasikan yang menghasilkan sebuah pembagian kerja global yang baru. Ketiga, *financiarization* yakni proses yang menjadikan uang sebagai *a real-time resource* yang memungkinkan tingkat mobilitas yang secara kualitatif tidak pernah ada preseden historisnya.

Bagi Hoogvelt<sup>16</sup> disiplin pasar global bisa dijelaskan dengan terlebih dulu memahami perbedaan mendasar antara wilayah pasar global dan prinsip pasar global. Sebuah wilayah pasar global terbentuk ketika terjadi pembagian kerja internasional dan, karenanya, pertukaran pasar internasional antara barang dan jasa yang berbeda yang diproduksi di negara-negara yang berbeda. Akibatnya pertumbuhan dan evolusi organisasi perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) pola perdagangan intraproduct. Pembagian kerja antar negara dengan sendirinya berakhir dan digantikan oleh kompetisi ekspor antara produsen dari negara-negara yang berbeda dan menawarkan produk yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi?

Hoogvelt mengajukan tiga jawaban. Mulanya MNC mengadopsi strategi integrasi sederhana dengan mendirikan cabang-cabang di luar negeri yang memproduksi dengan teknologi yang ditransfer dari negara asal MNC bersangkutan komoditi-komoditi yang sudah dibakukan yang sebelumnya menjadi objek perdagangan *interproduct*. Pada langkah berikutnya perusahaan induk mendirikan cabang-cabang luar negeri dan yang dilibatkan dalam sebuah rangkaian aktivitas produksi terbatas untuk menyediakan perusahaan induk bahan-bahan baku tertentu berdasarkan keuntungan komparatif yang dimilikinya. Akhirnya, MNC mulai menerapkan strategi integrasi yang lebih rumit dengan merubah disparitas geografi dan fragmentasi sistem produksinya menjadi jaringan produksi dan distribusi yang terpadu secara regional atau bahkan global. Setiap perusahaan cabang terlibat dalam proses produksi tapi tidak satu pun yang memproduksi sebuah produk sejak awal sampai akhir.

---

<sup>14</sup> Mustafa Edwin Nasution, 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana), hal.

16

<sup>15</sup> Ankie Hoogvelt, 2001, *Globalization and the Postcolonial World* (Basingstoke: Palgrave), hal.

131

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 131-133

Bagi banyak pengamat dan analis perkembangan sistem produksi internasional yang terpadu merupakan bukti yang memadai untuk memastikan munculnya perekonomian global<sup>17</sup>. Sistem ini mendorong lahirnya sebuah kondisi struktural yang memungkinkan diterapkannya prinsip-prinsip pasar global-standar dominan harga, kualitas dan efisiensi-terhadap produk domestik. Maksudnya, barang dan jasa diproduksi dalam wilayah perekonomian nasional harus mematuhi standar kualitas dan biaya produksi yang diterima secara global. Jika prinsip pasar global adalah hambatan struktural yang muncul dari perkembangan sistem produksi internasional yang terpadu, maka disiplin pasar global tak lain dari internasionalisasi hambatan struktural ini oleh setiap agen ekonomi dalam setiap tindakannya sendiri.

Dilain pihak pembentukan pembagian kerja global baru dimungkinkan, salah satunya, oleh fungsi teknologi komputer dan telekomunikasi yang memudahkan perusahaan merelokasi fungsi dan operasi yang semakin meluas ke wilayah apa saja yang menyediakan biaya buruh, asset, dan infrastruktur yang murah<sup>18</sup>. Perkembangan teknologi juga memungkinkan standarisasi, rutinisasi dan koordinasi aktivitas yang sebelumnya terhambat ruang dan karenanya dianggap tidak bisa diperdagangkan. Artinya teknologi mengubah aktivitas tersebut menjadi *real time activities*. Pada 1970-an dan 1980-an restrukturisasi industri dan redistribusi pekerjaan pada skala global melalui produksi internasional yang terpadu tersebut membawa keuntungan bagi munculnya banyak lapangan kerja baru di wilayah periferi, terutama di wilayah Asia Pasifik.

Tapi yang terpenting strategi memadukan produksi internasional dan bentuk baru koordinasi kerja bersama dengan beroperasinya prinsip pasar global sedang mengubah bentangan ruang (*landscape*) pembagian kerja global. Pembagian kerja ini tidak lagi tunduk pada keterbatasan geografis. Dulunya geografi pembagian kerja global berjalan sejajar dengan transformasi sekuensial barang yang sedang diproduksi dari aktivitas produksi dengan nilai tambah yang tinggi. Saat ini MNC telah berhasil mengalihkan internalisasi tahapan-tahapan peningkatan nilai tambah tersebut dalam cakupan organisasi kerjanya sendiri menjadi eksternalisasi semua atau sebagian besar tahapan-tahapan ini di bawah jaringan global. Mulanya, produksi dengan nilai tambah tinggi terpusat di negara maju, sedang produksi dengan nilai tambah yang lebih rendah berada di wilayah berkembang.

Kondisi sekarang ini, bukan hal yang aneh jika rantai pertambahan nilai dipotong dengan cara menempatkan potongan aktivitas yang padat karya dalam produksi barang-barang yang secara tradisional dianggap sebagai produk padat modal, teknologi dan memerlukan keahlian tinggi di wilayah dengan upah buruh yang

---

<sup>17</sup> D. Held and A. Mc Grew (eds), *The Global Transformation Reader* (Cambridge: Polity Press, 1999) sebagaimana dikutip oleh Eric Hiariej dalam *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. II, No. 1 Mei 2005

<sup>18</sup> Ankie Hoogvelt, 2001, *Globalization and the Postcolonial World* (Basingstoke: Palgrave)

rendah.<sup>19</sup> Tegasnya, pembagian kerja global yang baru sedang menggeser hubungan *core-periphery* dengan memasukkan beberapa segmen dari Dunia Ketiga menjadi bagian dari *core* sembari mendegradasi beberapa unsur lainnya dari *core* di pusat maupun di Negara-negara berkembang menjadi *periphery*. Hubungan pusat dan pinggiran menjelma menjadi hubungan sosial, tidak lagi hubungan berbasis geografis.

*Financiarization* atau proses pendalaman finansial terjadi ketika pertumbuhan transaksi finansial jauh melampaui pertumbuhan produksi dan perdagangan.<sup>20</sup> Proses ini tampak paling jelas dalam pergerakan modal yang tak mengenal rintangan waktu (modal finansial tidak lain dari kapital yang diputar dalam bentuk uang murni yang berbeda dari kapital yang dikaitkan dengan asset produktif). Proses melunturnya arti penting ruang melalui waktu oleh peralatan teknologi canggih yang memungkinkan modal finansial memindahi seisi bumi untuk menemukan peluang investasi yang paling menguntungkan dan untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya hanya dalam hitungan menit. Tapi apa sebetulnya yang terjadi dengan uang yang berputar cepat dalam *cyberspace*? Kenapa perputaran ini jauh lebih menguntungkan ketimbang memproduksi barang dan membayar buruh? Menurut Hoogvelt "...where telecommunications combine with computer-assisted data processing, money can be made by gathering up infinitesimally fractional differences in the movement in prices, be they interest rates, commodity prices or currency values."<sup>21</sup> Singkatnya, uang mulai bisa dihasilkan dari sirkulasi uang itu sendiri tanpa harus dipersulit keterbatasan tradisional ruang dan waktu.

Seperti yang diduga, globalisasi ekonomi melahirkan disparitas. Pertama-tama, pasar swasta menciptakan kesenjangan global. Perbedaan sosial semakin menajam dan terpolarisasi ketika yang kaya bertambah kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin.<sup>22</sup> Kemudian, kadar eksploitasi juga meningkat pesat. Globalisasi ekonomi meningkat pesat. Globalisasi ekonomi di antaranya, menciptakan individualisasi proses produksi dihitung sendiri-sendiri berdasarkan kontrak individual. Akibatnya, kekuatan buruh secara kolektif menjadi berkurang.<sup>23</sup> Pendek kata, pasar swasta melahirkan milyuner semacam Bill Gate di tengah-tengah buruh-buruh pabrik sepatu yang tertindas di Tangerang, Banten, dan orang-orang Afrika yang menyedihkan karena kelaparan di Somalia.

## VI. Negara-negara Muslim dalam Konstelasi Ekonomi Internasional

Negara Muslim dapat diartikan sebagai suatu negara yang segala peraturan kehidupannya didasarkan pada syariat Islam, seperti Iran, misalnya, namun dapat juga

---

<sup>19</sup> Paul Krugman, 1995, "Growing World Trade" in *Brookings Papers on Economic Activity*, hal. 327-377

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 140

<sup>22</sup> M. Castells, 2000, *The Rise of the Network Society* (Oxford and New Malden: Balckwell)

<sup>23</sup> Ankie Hoogvelt, 2001, *Globalization and the Postcolonial World* (Basingstoke: Palgrave)

negara Muslim diartikan sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, seperti Indonesia. Seperti kita ketahui mayoritas negara-negara Muslim di Dunia ini adalah negara yang merdeka pasca Perang Dunia II sehingga jelas relatif lebih muda dan baru jika dibandingkan negara-negara Barat seperti Amerika dan negara-negara di Eropa seperti Inggris, Perancis dan lain sebagainya. Meskipun kita tahu bahwa peradaban Islam sesungguhnya lahir jauh lebih awal, namun pasca *Renaissance* kenyataan memperlihatkan bahwa peradaban Barat jauh lebih maju, dan hal ini tentu berdampak bagi perkembangan dan kemajuan negara-negara Muslim selanjutnya. Adalah sebuah ironi memang ketika ternyata sebuah peradaban yang pada abad yang lalu menjadi hegemon sekarang menjadi demikian tertinggal dibanding peradaban lainnya.

Terkait dengan keadaan di atas di mana negara-negara Muslim menjadi negara yang senantiasa berada pada posisi yang tidak strategis jika dihadapkan dengan negara lain khususnya negara barat lebih-lebih jika dihadapkan pada isu-isu internasional maka pembahasan mengenai bagaimana negara-negara Muslim *survive* menghadapi hal tersebut menjadi sangat penting. Di era globalisasi seperti sekarang ini, di mana segala aspek kehidupan mengalami percepatan yang luar biasa, tentu memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang harus dihadapi oleh negara-negara Muslim.

Globalisasi sering digambarkan sebagai sebuah *the new mode of development* sehingga peralihan tatanan kehidupan ke arah globalisasi tentu memunculkan beberapa permasalahan. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa globalisasi memunculkan disparitas status negara atau dalam hal ini kelompok negara yang relative tegas yaitu antara “negara kaya dan maju dengan negara miskin atau berkembang”. Dari kondisi ini sudah barang tentu jika kelompok negara kaya dan maju yang menjadi *core* atau *center* dari segala perubahan sehingga apa-apa yang menjadi kebijakan dari kelompok negara tersebut yang harus diantisipasi. Fenomena kehidupan bernegara bangsa semakin kompleks karena kelompok negara maju akan menjadi hegemon dan superior terhadap kelompok negara miskin atau berkembang dan mau tidak mau kelompok negara miskin atau berkembang yang akan menjadi obyek. Dari kenyataan ini harus diakui memang bahwa mayoritas negara Muslim masuk kategori negara yang sedang berkembang, dan walaupun ada negara-negara Muslim yang kaya namun tetap belum bisa sejajar dengan negara barat khususnya tampak sekali pada pengambilan keputusan internasional.

Dari sekian masalah yang muncul akibat globalisasi, ada satu hal yang harus diantisipasi oleh negara-negara Muslim di Dunia ini di mana negara-negara Muslim merupakan salah satu obyek dari globalisasi yaitu masalah karakter ekspansif dan penetratif dari negara-negara kaya dan maju. Penjajahan tidak lagi berbasis geografis namun pasar dan teknologi sehingga muncul fenomena kapitalisme global. Di era pasca perang dingin ini peta atau format ekonomi politik dunia berikut aktor globalnya dapat digambarkan sebagai berikut. *Pertama*, secara umum, negara-negara yang ada di dunia ini bisa dipetakan secara dikotomis contohnya negara-negara ini bisa dibagi ke dalam negara-negara besar dan negara-negara kecil, negara-negara maju dan negara-negara berkembang, negara-negara yang kuat dan yang lemah secara ekonomi, negara-

negara yang kuat dan yang lemah secara militer, negara-negara yang berdiri sendiri atau yang bergabung dengan negara lain, dan lain sebagainya.

Kedua, berkembangnya organisasi-organisasi antar pemerintah (IGO atau *Inter-Governmental Organizations*). IGO bisa diklasifikasikan ke dalam organisasi yang bersifat: pertama, global-kewilayahan. Yang bersifat global kewilayahan ini bisa dibagi ke dalam: a). Yang berifat global, misalnya, PBB, IAEA (*International Atomic Energy Agency*), ILO (*International Labor Organization*), Bank Dunia, IMF, WTO (*World Trade Organization*), Mahkamah Internasional; b). Yang bersifat kewilayahan, misalnya, ASEAN, Uni Eropa, OAU (*Organization for African Unity*), ASEAN Regional Forum, APEC, NATD, OSCE (*Organization for Security and Cooperation in Europe*), Persemakmuran (yang tadinya Persemakmuran Inggris), Persemakmuran negara-negara independen (*Commonwealth of Independent States*, yang tadinya merupakan bagiannya Uni Soviet);[1] kedua, yang secara formal terkait dengan PBB (contohnya UNESCO, ILO, Bank Dunia, IMF, WTO, Mahkamah Internasional), dan yang tidak terkait dengan PBB.

*Ketiga*, negara yang kuat dan yang lemah, yang terdiri dari: a). yang kuat dan mantap, dengan Sekretariat yang cukup banyak sumber dayanya (contohnya PBB, Bank Dunia, IMF, Uni Eropa), dengan seorang Sekjen, atau Presiden yang jabatannya menjadi rebutan seperti jabatan Presiden atau Perdana Menteri sebuah negara; dan b). yang lemah, atau karena baru atau karena anggota-anggotanya tidak banyak memberi sumber daya padanya, contohnya: ASEAN Regional Forum; *keempat*, yang banyak dipengaruhi oleh dunia bisnis (contohnya Bank Dunia, IMF, WTO), dan yang banyak dipe-ngaruhi oleh INGO (*International Non-Governmental Organizations*) dan pendapat umum dunia (contohnya UNESCO); *kelima*, yang mewakili negara-negara berkembang atau pinggiran/periferi (contohnya GNB, OPEC, OKI, ASEAN, Organisasi Persatuan Afrika), dan yang mewakili negara-negara maju atau negara-negara industri atau negara-negara pusat (contohnya G7, Eropa, NATO, barangkali juga Bank Dunia dan IMF).

Melihat beberapa kategorisasi negara-negara di atas, tampak bahwa posisi nyata *Islamic Development Bank* sebagai representasi perekonomian negara-negara Muslim untuk mengaktualkan kepentingannya di Dunia dan Dunia Islam khususnya merupakan organisasi yang masuk kategori organisasi yang mewakili negara-negara berkembang atau pinggiran/periferi. Dalam konstelasi ekonomi politik internasional jelas *bargaining position* negara-negara Muslim masih lemah.

Namun demikian pasca runtuhnya kapitalisme dengan indikasi runtuhnya perekonomian Amerika sudah seharusnya negara-negara anggota IDB optimis untuk maju dan berkembang karena pada akhirnya sistem ekonomi Islam lah yang akan menjawab tantangan zaman. IDB merupakan lembaga keuangan Islam yang tidak dapat dipandang sebelah mata oleh organisasi lembaga keuangan internasional lainnya, terbukti IDB mampu membuktikan eksistensinya dengan terpilih sebagai lembaga dengan rating tertinggi. Tiga lembaga pemeringkat internasional terkemuka yaitu

Standard & Poor's, Fitch dan Moody's menempatkan Islamic Development Bank (IDB) sebagai Lembaga dengan rating tertinggi (Triple-A). IDB juga diakui sebagai bank yang memenuhi syarat untuk "Zero Risk-Weight" oleh Komite Basel pada Pengawasan Perbankan tahun 2004 dan Uni Eropa pada Mei 2007.

Negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI dan IDB sesungguhnya memiliki potensi sangat besar dalam memimpin reformasi sistem ekonomi dan keuangan dunia. Dengan memiliki visi bersama dan semangat kerja sama yang tinggi diharapkan negara Islam akan dapat menjadi kekuatan penyeimbang baru dalam percaturan ekonomi internasional yang sekarang didominasi oleh AS, Uni Eropa, Jepang, dan Cina.

## VII. IDB sebagai Representasi Kebangkitan Ekonomi Islam

Sejak negara-negara Muslim secara fisik berhasil membebaskan diri dari penjajahan dan kolonialisme Barat pada pertengahan abad kedua puluh, mereka segera memasuki dunia baru dengan persoalan-persoalan pembangunan yang rumit dan sulit. Pada tingkatan internal mereka dihadapkan pada sejumlah persoalan yang umum dihadapi oleh negara-negara yang baru merdeka, yang kemudian di dalam literatur ekonomi disebut negara-negara berkembang (*developing countries*), seperti agenda-agenda dan program-program untuk mengisi kemerdekaan, pembangunan ekonomi untuk mencapai kemakmuran, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain. Persoalan ini sangat wajar karena selama dalam masa penjajahan mereka tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusianya sehingga ketika kemerdekaan telah dicapai, tenaga-tenaga profesional yang andal dan memadai tidak tersedia yang mengakibatkan kemerdekaan belum bisa diisi secara optimal. Lebih dari itu permasalahan konflik politik sebuah negara baru tentu masih sangat tajam dan upaya *character building* yang belum jelas arahnya.

Pada tingkatan eksternal dan internalisasi telah terjadi polarisasi kekuatan ideologi politik dunia sebagai hasil bersih akhir (*net final result*) dari berakhirnya Perang Dunia Kedua. Negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika membangun blok dengan mendasarkan pandangan kapitalisme dan falsafahnya. Pada umumnya, mereka mengikuti paham kapitalisme yang terus disesuaikan dengan realitas dan tuntutan-tuntutan baru dengan tetap menjadikan mekanisme pasar dan harga sebagai inti ajaran pokoknya. Sementara itu Uni Soviet membangun blok komunis dengan pandangan yang benar-benar berseberangan dengan falsafah pembangunan Barat. Mereka mendasarkan inti ajaran perekonomian mereka kepada sistem komando yang mana negara yang dianggap pusat akan mengatur segalanya dan pola *top down* akan tampak sekali. Untuk sementara waktu, dua ideologi pembangunan ekonomi ini yaitu kapitalisme dan komunisme dapat melakukan yang terbaik dan mencoba untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya dari negara-negara Dunia Ketiga atau negara yang baru merdeka termasuk dalam hal ini mayoritas negara Muslim. Terkait dengan kompetisi dua ideologi perekonomian ini tentu seiring berjalannya waktu mengalami

perubahan. Pasca perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an, ideologi kapitalis menjadi hegemoni dan ideologi ini dapat melakukan penetrasi ke segala penjuru dunia termasuk ke Dunia Islam. Di tengah perekonomian global yang bernuansa kapitalis, ideologi komunisme tetap hidup dan dianut oleh beberapa negara seperti Rusia dan Korea Utara, dan untuk negara Muslim kita bisa melihat Syria.

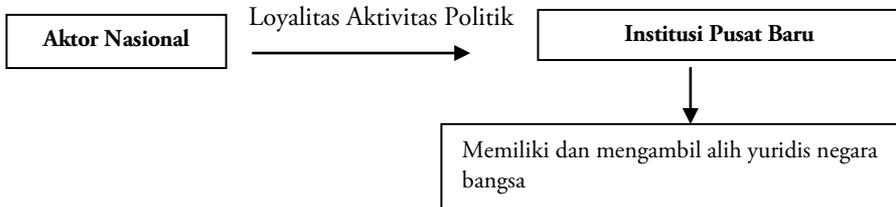
Dalam konstelasi ideologi politik dan pembangunan ekonomi inilah negara-negara Muslim yang masih sangat belia itu terperosok ke dalam konflik yang tajam yang bermula di sekitar dua falsafah pembangunan ekonomi sebagaimana tersebut di atas. Yang perlu digarisbawahi adalah kenyataan bahwa para pemimpin di negara-negara Muslim ini tidak mempunyai visi yang jelas mengenai pembangunan ekonominya, khususnya dalam hal ini adalah menenai rekonstruksi pembangunan ekonomi yang sarat akan nilai-nilai islami. Bahkan, yang umumnya terjadi adalah para pemimpin negara-negara Muslim tersebut menjadi kepanjangan tangan dari hegemoni dua falsafah pembangunan ekonomi tersebut yaitu kapitalisme dan komunisme.

Berbicara mengenai negara-negara Muslim yang ter subordinasi oleh kapitalisme global, maka sebaiknya ada sebuah media yang menjadi manifestasi negara-negara Muslim dengan sebuah harapan melalui media itulah negara-negara Muslim dapat bernaung ketika ada kesulitan. Suatu kerjasama dapat menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dan signifikan khususnya dalam hal bernegara bangsa, organisasi internasional misalnya, hal ini dapat kita lihat pada keberhasilan Masyarakat Ekonomi Eropa. MEE dapat berhasil karena sebuah integrasi yang sistematis antar negara-negara di Eropa, sehingga tatanan kehidupan negara-negara di Eropa relatif lebih maju dan makmur dari sisi perekonomiannya setelah lahir MEE. Kembali ke dunia Islam, kita akan membahas mengenai Organisasi Konferensi Islam yang selama ini senantiasa diklaim sebagai salah satu organisasi internasional media pemersatu negara-negara Muslim. Dalam menjelaskan mengenai integrasi negara-negara Muslim di dalam OKI maka akan sangat penting untuk mengidentifikasi integrasi versi neo fungsionalisme. Adapun urgensi membahas kerangka neo fungsionalisme ini adalah bahwa tumbuhnya organisasi yang terjadi dalam OKI merujuk pada pola-pola neo-fungsionalisme.

Fungsionalisme merupakan cabang dari strukturalisme, yaitu bentuk strukturalisme yang menggunakan metode keseimbangan. Pencetus fungsionalisme adalah Emile Durkheim yang menyatakan bahwa fakta-fakta sosial membutuhkan penjelasan kemasyarakatan yang bersifat fungsionalis. Sebagai model yang diambil dari ilmu-ilmu alam, fungsionalisme menerima analogi “organisme”, bahwa suatu satuan social atau politis akan mempunyai kualitas penyesuaian diri tertentu. Paduan antara neo fungsionalisme dan integrasi maka diharapkan muncul sesuatu yang baru yaitu sebuah komunitas politik. Dalam proses ini akan dibedakan antara organisasi dengan integrasi. Tidak seperti organisasi internasional yang menetapkan mekanisme kelembagaan antar bangsa, integrasi internasional membentuk mekanisme pembuatan keputusan di atas mereka (supranasionalisme). Singkatnya organisasi internasional

adalah menetapkan mekanisme kelembagaan antar negara dan integrasi internasional merupakan bentuk mekanisme pembuatan keputusan. Lebih jelasnya lihat diagram berikut ini:

**Proses dari Hass :**



Tesis utama neo fungsionalisme adalah bahwa integrasi dalam satu sektor cenderung ekspansif merangsang timbulnya integrasi di sektor-sektor lain. Ini merupakan strategi yang ditawarkan untuk menuju unifikasi politik.

Selanjutnya mengenai IDB, kita akan menganalisis bagaimana negara-negara anggota IDB yang terdiri dari 56 negara anggota bekerjasama dan berintegrasi secara intensif sehingga muncul sebuah mekanisme baru untuk membangkitkan kehidupan di Dunia Islam. Sejak berdirinya OKI secara resmi pada tahun 1970-an, sudah banyak sekali kerjasama antar negara anggota pada berbagai aspek kehidupan, baik kerjasama di bidang politik, ekonomi yang IDB di dalamnya, sosial-budaya, IPTEK, dan lain sebagainya. Terkait masalah pada karya ini yaitu mengenai prospek IDB sebagai representasi kebangkitan sistem ekonomi Islam, maka kita akan melihat kiprah IDB di bidang ekonomi sejak berdirinya.

Di tahun 1980-an atau di awal-awal berdirinya OKI, isu ekonomi belum bisa diaktualkan secara maksimal, karena isu-isu politik di Dunia Islam jauh lebih menjadi perhatian. Untuk kepentingan kemajuan perekonomian negara-negara anggotanya OKI mendirikan *International Conference On Information and Communication Technologies and Development* (ICTD), *Islamic Solidarity Fund* (ISF) dan *Islamic Development Bank* (IDB) yang mana pada tahun-tahun tersebut cukup membantu meskipun belum merata. Pada tahun ini keberhasilan yang dicapai OKI dalam bidang ekonomi adalah kerjasama dalam budi daya pertanian, dan ini tentu cukup signifikan bagi sebuah proses kemajuan yang menyeluruh.

Pada tahun 1990-an IDB mendapat tugas sebagai pengawas *Free Industrial and Trade Zone* dan D-8 (*Development 8*) sebagai bentuk perhatian OKI untuk kemakmuran negara anggotanya. Dua gagasan ini bertujuan untuk mengantisipasi arus global. Beberapa tahun terakhir ini program tersebut berkembang dan mampu meluaskan kerjasama pertanian ke ekspor-impur hasilnya, terutama bahan dasar kain, sehingga dari budi daya bahan dasar meningkat menjadi tekstil.

Selanjutnya di tahun 2000-an, ketika arus global semakin tidak terkendali OKI juga mengantisipasi dengan adanya penerbitan *sukuk* (obligasi syariah). Penerbitan

*sukuk* ini adalah sebuah strategi menuju pasar global. Dalam hal penerbitan *sukuk* ini OKI dan IDB mengambil *adjustment strategy* atau sebuah strategi penyesuaian yang diambil untuk merespon kondisi lingkungan atau dalam hal ini adalah perkembangan dunia yang menuju kapitalisme global. Dari sini tampak bahwa OKI sebagai representasi negara-negara Muslim berusaha untuk *survive* di tengah persaingan global. Pada tahun 2000-an ini D-8 juga memberikan kontribusi positif bagi kemajuan negara-negara Muslim yang mana ini terlihat pada KTT D-8 tahun 2006 di Bali, Indonesia.

Terkait dengan D-8 atau *Development 8*, beberapa waktu lalu telah melakukan KTT di Bali Indonesia, ada perkembangan yang luar biasa pesat dari D-8 ini. Selain isu mengenai politik, nuklir Iran, tentu isu ekonomi menjadi pokok pembicaraannya. Para kepala negara dan kepala pemerintahan atau wakil yang hadir dalam KTT D-8 adalah Menlu Bangladesh Morshad Khan, Menteri Kerjasama Internasional Nlesir Fayza Aboulnaga, Presiden Iran Niahmoud Ahmadinejad, PM Malaysia Ahmad Badawi, Presiden Nigeria Olesegun Obasanjo, Perdana Menteri Pakistan Shaukat Aziz, serta Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan.

Tujuan utama pembentukan kerjasama D-8 masih dalam kerangka persatuan ekonomi negara-negara Muslim dalam OKI dan IDB yaitu untuk meningkatkan posisi negara berkembang dalam perekonomian dunia, memperluas dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan. Pembentukan kerjasama itu juga untuk meningkatkan partisipasi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional dan mengupayakan peningkatan taraf hidup bagi warganya.

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa peran IDB sesungguhnya cukup real dalam mewujudkan kemakmuran dan kemajuan di negara-negara Muslim namun memang masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kompleksitas kepentingan-kepentingan negara-negara anggotanya, sehingga tidak jarang IDB dikatakan kurang berperan untuk kemajuan Dunia Islam.

Seperti apa yang dipaparkan dari bagan proses integrasi oleh Hass, terlihat bahwa IDB sedang dalam proses tersebut. Negara-negara anggota IDB sebagai aktor nasional yang akan memberikan loyalitas aktivitas politiknya pada institusi pusat baru atau dalam hal ini adalah *Islamic Development Bank* (IDB) dan selanjutnya institusi IDB ini memiliki dan mengambil alih yuridis negara bangsa untuk masalah-masalah internasional yaitu dapat melalui sebuah komunitas ekonomi politik berupa Konferensi Tingkat Tinggi atau Kerjasama negara-negara anggota IDB.

Ketika ekonomi Islam diartikan sebagai pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan seperti terurai sebelumnya, maka IDB sesungguhnya cukup representatif untuk mewujudkan hal tersebut dalam konteks global meskipun belum maksimal dan masih membutuhkan perjuangan panjang negara-negara Muslim untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan. Dari analisis di

atas tampak bahwa sesungguhnya dengan sebuah kerjasama yang solid dan integrasi yang berkualitas antar negara anggota IDB maka bukan tidak mungkin jika Ekonomi Islam akan menjadi sebuah ideologi yang nyata akan memberikan keadilan dan kemakmuran yang bernuansa kemanusiaan dan Islami bagi tidak saja bagi negara-negara Muslim tetapi juga bagi negara-negara di Dunia pada umumnya sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan secara signifikan.

Dalam tahapan yang real sebetulnya apa yang bisa dilakukan IDB sebagai lembaga keuangan Islam Internasional dan sekaligus representasi kebangkitan ekonomi Islam Internasional? IDB sebetulnya mempunyai potensi yang tidak dimiliki lembaga keuangan Internasional lainnya seperti IMF dan ADB dan sebagainya. IDB mempunyai potensi unik yaitu jumlah populasi negara anggota yang hampir seperlima dari total penduduk dunia atau sekitar 1,9 miliar populasi, menguasai hampir 80persen cadangan minyak dunia, cukup untuk kebutuhan 75 tahun mendatang. Selain itu, 90 persen cadangan hidrokarbon dunia berada di dunia Islam.

Jika akan dikaji lebih lanjut ada dua isu besar yang bisa dijadikan agenda besar yang strategis bagi IDB untuk mengantisipasi krisis perekonomian, sembari mempersiapkan agenda tatanan baru ekonomi dunia, yaitu penggunaan mata uang bersama dan pasar bersama dunia Islam. Dalam kerangka integrasi isu mata uang dan pasar bersama ini dapat dideskripsikan sebagai tahapan penyatuan negara anggota IDB untuk keberlanjutan dan kemajuan perekonomian negara-negara muslim.

Dalam hal mata uang, saat ini ada 3 mata uang sentral dalam perekonomian dunia yaitu Dolar Amerika, Euro, dan Yen Jepang. Sistem moneter Internasional sangat tidak berpihak terhadap negara-negara Dunia Ketiga sehingga muncul ketidakadilan dalam sistem Internasional. Negara Dunia Ketiga menjadi negara yang tingkat ketergantungannya sangat tinggi terhadap sistem tersebut.

Namun, seiring berjalannya waktu dan runtuhnya kapitalisme dan porak porandanya sistem ekonomi dunia hendaknya ada yang mampu menawarkan solusi. Dalam konteks mata uang gold dinar dapat dijadikan solusi. Selama penggunaannya, gold dinar dinilai lebih stabil dan memiliki tingkat inflasi dan fluktuasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan uang fiat. Gold dinar berperan mempermudah perdagangan dan mengurangi hambatan perdagangan, seperti spekulasi, fluktuasi nilai tukar yang tajam, dan berbagai hambatan lainnya. Penggunaan gold dinar dapat diawali dengan menggunakannya pada transaksi perdagangan negara anggota IDB.

Selanjutnya tentang pasar bersama, ide pasar bersama sudah memulai tahapannya lebih awal terbukti dengan adanya *Free Trade* dan D8. Langkah selanjutnya adalah negara Islam perlu segera membangun sistem keuangan Islam yang terintegrasi, baik perbankan, pasar modal, dan institusi keuangan syariah lainnya. Kita membutuhkan penguatan pendanaan dan peran Islamic Development Bank (IDB) sebagai World Bank-nya dunia Islam. Kita juga membutuhkan Dana Moneter Islam Internasional (semacam IMF) yang skema pembiayaannya bebas bunga. Dengan demikian integrasi sistem perekonomian akan semakin kokoh. Sekaranglah saatnya IDB

mengambil langkah tegas dan strategis untuk menggantikan sistem ekonomi dan keuangan dunia yang sangat tidak adil. Peran OKI dan IDB akan sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Muslim dunia. Dua isu sentral yang tadi dikemukakan akan sangat membantu proses integrasi ekonomi negara-negara Muslim untuk menghadapi kondisi ekonomi dunia saat ini.

## VIII. Kesimpulan

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa IDB sangat potensial untuk menjadi representasi kebangkitan Sistem Ekonomi Islam di tengah persaingan ekonomi Internasional. Kemakmuran dan kemajuan negara-negara Muslim dapat terealisasi jika kerjasama antara negara-negara Muslim ditingkatkan kualitasnya, sehingga melalui kerjasama-kerjasama tersebut dapat muncul sebuah integrasi dan komunitas politik yang dapat bertindak sebagai *decision maker* (pengambil kebijakan). Melalui IDB sebagai manifestasi sebuah negara Muslim Internasional pada prinsipnya cita-cita luhur aktualisasi dan realisasi sebuah sistem Islam dapat terwujud, khususnya dalam bidang ekonomi, namun kerjasama dan loyalitas negara-negara Muslim terhadap sistem yang terintegrasi dalam IDB masih perlu untuk ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- al-Ahsan, Abdullah, (1988), *OIC, The Organization of the Islamic Conference, An Introduction to Political Institution*, USA: The International Institute of Islamic, Though Herndon.
- Apter, David, (1985) *Introduction to Political Analysis*, terj. Setiawan Abadi, Jakarta: LP3ES
- Castells, M., (2000) *The Rise of the Network Society*, Oxford and New Malden: Balckwell.
- Daugherty, James and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., (1990) *Contending Theories of Internasional Relations A Comprehensive Survey Third Edition*, New York: Harper Collins Publisher.
- Deutsch, Karl W. et al, (1957) *Political Community and The North Atlantic Area* Pricenton: Pricenton University Press.
- Held, David & Anthony Mc. Grew, David Goldblatt & Jonathan Peraton, (1999) *Global Transformations: Politics, economics, and Culture*, Great Britain: Polity Press.
- Hoogvelt, Ankie, (2001) *Globalization and the Postcolonial World*, Basingstoke: Palgrave.

**Ulfa Jamilatul Farida:** *Prospek Islamic Development Bank...*

Krugman, Paul, (1995), "Growing World Trade" in *Brookings Papers on Economic Activity*

Nasution, Mustafa Edwin, (2007)*Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.

Pirzada, S.S., (1988)*The Organization Of The Islamic Conference*, Jeddah Saudi Arabia.

Syahdeini, Sutan Remy, 1999)*Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti: Jakarta.

**Website:**

"RI-Iran Jajaki Kerjasama Energi Nuklir, Target Bangun PLTN 1000 Megawatt Tahun 2015", [http://portal.djlpe.esdm.go.id/modules/news/index.php?\\_act=detail&sub=news\\_media&news\\_id=478](http://portal.djlpe.esdm.go.id/modules/news/index.php?_act=detail&sub=news_media&news_id=478)

[http://www.acehinstitute.org/opini\\_effendi\\_hasan\\_280507\\_globalisasi\\_dan\\_pengaruhnya\\_thd\\_negara\\_miskin.htm](http://www.acehinstitute.org/opini_effendi_hasan_280507_globalisasi_dan_pengaruhnya_thd_negara_miskin.htm)

<http://www.e-venthorizon.net/globalgov/humpty.html>

**Jurnal:**

*Jurnal Hubungan Internasional* Vol. II, No. 1, Mei 2005